

Lampiran I
 Surat Nomor : B/1625/M.SM.01.00/2021
 Tanggal : 10 November 2021

DAFTAR MATERI POKOK JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2017)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, dan Undang-undang Dasar • Pemerintahan Pusat-Daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum • Pengetahuan komputer yang bersifat umum <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi kependudukan yang bersifat khusus • Pencatatan sipil yang bersifat khusus • Pengetahuan sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 42/KEP/M.PAN/12/2000)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan kerangka acuan penyusunan kebijakan program • Pengkategorian/pengelompokkan bahan/literatur/laporan dalam rangka penyusunan kebijakan program <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akreditasi institusi dan program kesehatan • Pelaksanaan perzinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan • Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan • Pengorganisasian pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan • Penyusunan laporan
3	Analisis Akuakultur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor Nomor 31 Tahun 2019)	<p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sarana dan prasarana budidaya • Pengelolaan perbenihan ikan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB) • Pengendalian peredaran pakan ikan • Perlindungan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan usaha perikanan
4	Analisis Anggaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 21 Tahun 2016)	<p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisa dampak kebijakan penganggaran • Melakukan analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan penganggaran • Melakukan analisis kebutuhan teknis operasional dalam mengimplementasikan kebijakan PNBPN • Melakukan analisis penyusunan postur APBN, exercise/simulasi perhitungan asumsi dasar APBN berdasarkan arah kebijakan dan dokumen-dokumen perencanaan • Melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran • Melakukan penyusunan alokasi pagu belanja K/L • Melakukan penyusunan tarif dan target PNBPN <p>Kompetensi Umum</p>

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<p>APBN, Dana Transfer, Dokumen Perencanaan Anggaran, Fungsi APBN, Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, Keuangan pusat-daerah, Kewenangan anggaran DPR, Kewenangan pengelolaan keuangan, Lingkup keuangan negara, Pelaksanaan APBN, Pembiayaan anggaran, Penerimaan negara, Pengertian keuangan negara, Perpu terkait anggaran, Pilar reformasi penganggaran, Pola Hubungan Keuangan, Postur APBN, Prinsip pengelolaan keuangan, Regulasi, Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, Sistem perencanaan</p>
5	<p>Analisis APBN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2014)</p>	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur, teknik, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif • Pendapatan nasional, perencanaan pembangunan dan teori dasar ekonomi mikro dan makro <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD) • Menganalisis data dengan pendekatan statistik dasar
6	<p>Analisis Hukum Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 51 Tahun 2020)</p>	<p>Kemampuan Umum</p> <p>Ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan praktik hukum acara.</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah • Memahami analisis dan evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Memahami analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis. • Memahami analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7	<p>Analisis Kebakaran Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2019)</p>	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dasar teori api, penyebab, dan proses terjadinya kebakaran • Teori dasar anatomi tubuh serta tehnik dasar penyelamatan darurat yang membahayakan jiwa manusia • Pengetahuan dasar kesemaptaan, <i>continuous</i> jaga, dan pengetahuan teori baris berbaris • Jenis dan tipe sarana prasarana pemadam kebakaran • Pemahaman dasar keselamatan petugas dan penggunaan <i>Self Contained Breathing Apparatus</i> (SCBA) • Peraturan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran seperti Lampiran UU 23 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2018, Permendagri 122 Tahun 2018, Permenpan RB No 16 Tahun 2019, Permenpan RB No 17 Tahun 2019, Permen PU No 26 Tahun 2008, dan SNI Pemadam Kebakaran • Pengetahuan dasar simpul tali temali dalam proses penyelamatan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang jenis dan tipe-tipe system proteksi aktif kebakaran seperti APAR, Detektor, Sistem Alam, dan Sistem <i>Sprinkle</i> • Sistem proteksi bangunan gedung • Tehnik dasar pemadaman kebakaran dan penyelamatan

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan substansi kebijakan publik • Metode riset • Teknik dan analisa kebijakan • Penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi • Komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring Kerjasama • Pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi
9	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/14/M.PAN/6/2008)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Management di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik • Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik • Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik
10	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan terkait pertanian dan ketahanan pangan, gizi, BULOG, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). • Neraca Bahan Makanan (NBM), Angka konversi pangan, Sumber Daya dan Akses Pangan. • Harga Pokok Pembelian (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Dasar, Nilai Tukar Petani (NTP), Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), Pengelolaan cadangan pangan. • Direktori Konsumsi, Pedoman Gizi Seimbang, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), Pola Pangan Harapan (HPP). • Juknis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Angka Rawan Pangan (ARP), <i>Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>.
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 42 Tahun 2014)	<p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah • Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Hukum Keuangan Negara <p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Akuntansi Pemerintah

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengantar Statistik • Pengantar Ilmu Ekonomi
12	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebutuhan, preferensi dan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam negeri sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pemetaan dan akses pasar luar negeri serta penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/petunjuk teknis • Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan • Pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
13	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar dalam negeri • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akses pasar luar negeri • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan pelaksanaan promosi hasil kelautan dan perikanan serta pengelolaan data, informasi dan publikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
14	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2012 jo Nomor 23 Tahun 2013)	<p>Undang-Undang terkait Pangan dan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani • Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan • Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura • Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan • Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah <p>Isu faktual terkait komoditas pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi harga • Perdagangan Internasional • Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian <p>Teori dasar ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori pembangunan, inflasi dan eksternalitas • Teori permintaan dan penawaran • Teori pasar <p>Metode analisa terkait ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa usaha tani • Analisa struktur pasar • Matriks analisis kebijakan <p>Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan harga keseimbangan • Perhitungan kelayakan usaha tani

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
15	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2012 jo Nomor 23 Tahun 2013)	Sektor Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Sub Sektor Tanaman Pangan • Sub Sektor Hortikultura • Sub Sektor Peternakan • Sub Sektor Perkebunan • Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah Isu faktual terkait komoditas pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisasi harga • Organisasi di bawah PBB yang terkait pangan dan pertanian Pengumpulan Data Informasi Hasil Pertanian Analisis data sederhana: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur pasar • Mengolah data secara sederhana Implementasi hasil analisa ekonomi pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan perubahan harga • Perhitungan kelayakan usaha tani
16	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 42 Tahun 2020)	Kemampuan umum <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan negara • Kelembagaan DPR dan DPD • Manajemen ASN Kemampuan khusus <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pendukung (<i>supporting system</i>) DPR dan DPD • Jabatan fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif • Pengkajian evaluasi Peraturan Perundang-undangan
17	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2018)	Kompetensi Khusus <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD • Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Perencanaan Pelaksanaan Anggaran • Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara/Daerah • Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga • Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan Negara • Perbendaharaan Negara • Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
18	Analisis Perdagangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 68 Tahun 2020)	Materi umum dan khusus terkait analisis di bidang perdagangan
19	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2018)	Pengantar Ilmu Pertanian (PIP): <ul style="list-style-type: none"> • Pola tanam • Pupuk dan pemupukan • Bibit unggul • Terminologi pertanian Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman (DPT):

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi pestisida • Pengenalan gejala HPT • Pengantar fitopatologi • Pengantar entomologi <p>Ilmu Penyakit Tumbuhan (IPT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioekologi penyakit tumbuhan • Tanda penyakit tumbuhan • Gejala penyakit tumbuhan • Epidemiologi • Deteksi dan identifikasi patogen <p>Ilmu Hama Tumbuhan (IHT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekologi serangga hama • Biologi serangga hama • Tanda hama tumbuhan • Gejala hama tumbuhan • Deteksi dan identifikasi hama <p>Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah karantina tumbuhan • Tugas pokok dan fungsi karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati <p>Pengendalian Hama Terpadu (PHT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultur teknis • Varietas unggul • Pengendalian hayati
20	Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep kebun raya dan konservasi • Lanskap kebun • Penulisan ilmiah • Pengembangan kawasan kebun raya • Identifikasi tumbuhan • Database koleksi • Pengembangan koleksi tumbuhan • Pengolahan data di kebun raya • Penyiapan sarana prasarana kebun raya • Perawatan koleksi tumbuhan
21	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2020)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Analisis SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi Human Capital Management di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan tatalaksana di sektor publik

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja analisis dan desain pengembangan reformasi birokrasi dan pengelolaan zona integritas di sektor publik • Kerangka kerja proses dan analisis pengembangan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur di sektor publik • Kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik
22	Apoteker Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 140/KEP/M.PAN/11/2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <p>Penyiapan rencana kerja kefarmasian</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan perbekalan farmasi • Pelayanan farmasi klinik • Pelayanan farmasi khusus • Pengabdian masyarakat • Pelayanan kefarmasian di tempat resiko tinggi dan atau rawan • Menjadi saksi penghapusan perbekalan farmasi dan atau dokumentasinya
23	Arsiparis Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 48 Tahun 2014)	<p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar kearsipan • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip dinamis: penyusutan arsip, penggunaan dan pemeliharaan • Pengelolaan arsip statis: pengolahan arsip statis, preservasi arsip, autentikasi arsip • Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan • Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi: publikasi arsip melalui SIKN
24	Arsiparis Terampil (PERMENPANRB Nomor 48 Tahun 2014)	<p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar kearsipan • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2014 <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip dinamis: penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan • Pengelolaan arsip statis: layanan arsip statis, pengolahan arsip statis
25	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 45 Tahun 2014)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas pokok Jabfung AMMI • Jenjang Jabfung AMMI • lembaga infrastruktur mutu • Konsep organisasi • Pengetahuan tentang standar • Konsep dasar sistem manajemen • Pengetahuan tentang regulasi • Wawasan industri • Pengetahuan tentang ISO

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang Jabfung AMMI • Pengetahuan produk dan pengujian • Pengetahuan sertifikasi produk • Sistem manajemen mutu • Pengetahuan tentang SNI • Pemberlakuan SNI wajib bidang industri • Pengetahuan asesmen sistem manajemen mutu • Analisis studi kasus sistem manajemen mutu
26	Asisten Apoteker Terampil (PERMENPANRB Nomor PER/08/M.PAN/4/2008)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggolongan obat • Fungsi alat kesehatan dan PKRT • Harga jual apotek • Pengiriman obat/alkes khusus • Timbangan bahan baku • Dasar-dasar kesehatan dan kefarmasian • Penandaan sediaan farmasi • Jenis imunisasi dan obat <p>Kemampuan Khusus</p> <p>Palayanan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, distribusi, evaluasi</p>
27	Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil (PERMENPANRB Nomor 60 Tahun 2018)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udara) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur angkutan udara • Standar pelayanan penerbangan • Perizinan angkutan udara • Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara
28	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil (PERMENPANRB Nomor 56 Tahun 2018)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udaraan) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Barang-barang berbahaya • KKOP di Bandar Udara • Peralatan pemadam kebakaran penerbangan dan rambu-rambu keselamatan penerbangan
29	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil (PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2020)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udaraan) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Prosedur operasional baku kelaikudaraan pesawat udara • Prosedur perijinan kelaikudaraan dan teknisi pelaksana kelaikudaraan pesawat udara • Sistem pemeliharaan untuk mencapai kelaikudaraan pesawat udara
30	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
	(PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udara) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Peraturan Menteri yang mengatur pelayanan navigasi penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur navigasi penerbangan • Standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengendalian pelayanan navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengawasan pelayanan navigasi penerbangan
31	Asisten Pelatih Olahraga Pemula (PERMENPANRB Nomor 41 Tahun 2014)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah olahraga • Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah • PJOK <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga • Permainan dan olahraga • Atletik • Akuatik • Senam dan aktivitas ritmik • Beladiri • Aktivitas luar kelas • Dasar-dasar keilmuan olahraga • Dasar-dasar kepelatihan olahraga • Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga • Dasar-dasar administrasi pertandingan
32	Asisten Pelatih Olahraga Terampil (PERMENPANRB Nomor 41 Tahun 2014)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah olahraga • Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah/non pemerintah • PJOK <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan olahraga

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Permainan dan olahraga • Atletik • Akuatik • Senam dan aktivitas ritmik • Beladiri • Aktivitas luar kelas • Dasar-dasar keilmuan olahraga • Dasar-dasar kepelatihan olahraga • Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga • Dasar-dasar administrasi pertandingan
33	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil (PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2016)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial • Dasar-dasar Metode Penelitian Sosial • Komunikasi Efektif • Konseling • Sistem Peradilan Pidana Indonesia <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Dasar Pembimbingan Kemasyarakatan • Sistem Pemasyarakatan Indonesia • Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan
34	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2018)	<p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan kelautan dan perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan • Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan • Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan • Uji terap Teknik produk kelautan dan perikanan • Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan
35	Asisten Penata Anestesi Terampil (PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2017)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berperilaku profesional • Komunikasi efektif • Pengembangan diri dan profesionalisme <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuhan keperawatan intra anestesi • Asuhan keperawatan pasca anestesi pada tindakan anestesi • Asuhan kepenataan pra anestesi • Kegawatdaruratan dan bencana • Penugasan tindakan anestesi di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang • Tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi
36	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan • Konsep dasar standarisasi/kelaikan/pemeliharaan/permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI;

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		penerapan standar API dan APBI; rekomendasi teknis API.
37	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil (PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur identifikasi, pengembangan, tata operasional dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan • Konsep dasar standarisasi/kelaikan/pemeliharaan/ permesinan, refrigerasi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, serta ABPI di kapal perikanan • Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rancangan standar API dan ABPI; penerapan standar API dan APBI; rekomendasi teknis API.
38	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil (PERMENPANRB No 4 Tahun 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi dasar • Elektro dasar • Komputer dan jaringan • Telekomunikasi dasar
39	Asisten Perisalah Legislatif Terampil (PERMENPANRB Nomor 27 Tahun 2017)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan negara dan sejarah Indonesia • Manajemen ASN dan pembentukan Undang-Undang <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan DPR • Jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif Terampil dan penulisan sesuai PUEBI • Instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif
40	Asisten Pranata Siaran Terampil (PERMENPANRB Nomor 32 Tahun 2017)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Permenpan 32 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori komunikasi: prinsip komunikasi, komunikasi massa • Teori jurnalistik: dasar jurnalistik, berita, wawancara • Media penyiaran: sejarah radio, dasar media massa, profesi siaran, proses produksi siaran, program siaran, keunggulan radio • Pemahaman mengenai pedoman umum Bahasa Indonesia
41	Asisten Teknisi Siaran Terampil (PERMENPANRB Nomor 31 Tahun 2017)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 • Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Teknis Produksi: teori multimedia - sosial

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<p>media, teori multimedia - digitalisasi media, teori multimedia - audio, teori multimedia - video, teori multimedia - jurnalisme online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Transmisi: teori dasar-dasar pemancar radio - gelombang radio, teori dasar-dasar pemancar radio - dasar pemancar radio, dasar teknologi radio, teori dasar gelombang televisi, teori dasar pemancar televisi, teori dasar teknologi televisi • Teknik Dasar Elektronika: teori dasar elektronika, teori dasar-dasar elektro, listrik statis, muatan listrik, arus listrik, sifat elektron • Teknik Antena: teori dasar-dasar antenna • Teknik Pengukuran: teori alat ukur dan teknik pengukuran • Teknik Studio: dasar-dasar audio dan teknik studio, dasar-dasar kamera • Teknik komputer: teknik dasar komputer
42	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2020)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Assessor SDM Aparatur <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi • Kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis talenta • Proses asesmen dan pengelolaan kompetensi/ potensi Aparatur Sipil Negara • Kerangka kerja monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil asesmen
43	Auditor Ahli Pertama (PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP • Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern • Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut • Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, Sikap profesional • Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern • Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal
44	Auditor Terampil (PERMENPANRB No PER/220/KEP/M.PAN/6/2006 jo No 51 Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik: Tata Kelola, Manajemen risiko, Pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP • Bidang Strategi Pengawasan: Kerangka konseptual pengawasan intern Pemerintah Indonesia, prinsip-prinsip dasar audit intern, standar umum audit intern dan standar pelaksanaan audit intern

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan: Pelaporan hasil penugasan pengawasan dan pelaksanaan prosedur tindak lanjut • Bidang Sikap Profesional: Kode etik, Pedoman perilaku, Standar untuk praktik professional audit internal dan kode etik, Sikap profesional • Bidang Komunikasi: Standar komunikasi audit intern • Bidang Lingkungan Pemerintahan: Administrasi pemerintahan, Pemerintahan daerah, Pemberantasan tindak pidana korupsi, Perbendaharaan negara, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara • Bidang Manajemen Pengawasan: Pengelolaan fungsi audit internal
45	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama (PERMENPANRB No 40 Tahun 2012)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Auditor Kepegawaian/Manajemen ASN <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara • Audit pengawasan Manajemen ASN • Audit pengendalian Manajemen ASN • Audit investigasi Manajemen ASN • Penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi Manajemen ASN
46	Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 94 Tahun 2020)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur • Kebijakan pembinaan jabatan fungsional Auditor Kepegawaian/Manajemen ASN <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara • Audit pengawasan Manajemen ASN • Audit pengendalian Manajemen ASN • Audit investigasi Manajemen ASN • Penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi Manajemen ASN
47	Bidan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2019)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan perilaku sesuai kode etik Bidan • Komunikasi efektif dengan klien dalam memberikan pelayanan kebidanan • Penerapan manajemen dan kepemimpinan dalam praktik kebidanan <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu • Pelayanan kesehatan anak • Pelayanan kesehatan reproduksi dan KB • Pelayanan kebidanan komunitas • Pengelolaan pelayanan kebidanan • Pengelolaan program pemerintah
48	Bidan Terampil (PERMENPANRB Nomor 36 Tahun 2019)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan asuhan kebidanan • Kompetensi dan peran bidan • Aspek hukum kebidanan <p>Kemampuan Khusus</p>

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu • Pelayanan kesehatan anak • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB • Pelayanan kebidanan komunitas • Pelaksanaan program pemerintah
49	Diplomat Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 4 Tahun 2018)	<p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri • Advokasi kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri • Negosiasi <p>Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia • Penanganan dan kerja sama multilateral • Penanganan dan kerja sama regional dan ASEAN • Diseminasi informasi kebijakan politik luar negeri • Perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri • Pelayanan konsuleran • Pelayanan keprotokolan • Pembangunan dan pengelolaan media • Penguasaan substansi dan kawasan/negara • Pelayanan fasilitas diplomatik • Pembuatan perjanjian internasional • Diplomasi publik • Kerja sama dan bantuan luar negeri • Layanan keamanan diplomatik • Manajemen kelembagaan diplomasi
50	Dokter Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 139/KEP/M.PAN/11/2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan • Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit • Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis • Rujukan pada pelayanan KIA • Jenis dan teknik pada layanan imunisasi • Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah • Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat • Etik kedokteran <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan tata laksana penyakit • Pelayanan KIA • Pelayanan imunisasi • Vaksinasi dan ICV • Pelayanan gizi • Penyuluhan kesehatan • Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit • Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan • Surat keterangan medis • Konsultasi/rujukan • Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja • Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
51	Dokter Spesialis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 139/KEP/M.PAN/11/2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komunikasi yang efektif/anamnesa dalam pelayanan kesehatan • Skrining sederhana dalam rangka kewaspadaan diri, kejadian luar biasa dan wabah penyakit • Pemeriksaan laboratorium sederhana, pemeriksaan penunjang laboratorium atau pencitraan medis • Rujukan pada pelayanan KIA • Jenis dan teknik pada layanan imunisasi • Penerapan pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah • Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat, meliputi penerapan, identifikasi, kaderisasi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat • Etik kedokteran <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan tata laksana penyakit • Pelayanan KIA • Pelayanan imunisasi • Vaksinasi dan ICV • Pelayanan gizi • Penyuluhan kesehatan • Verifikasi data kesehatan dalam pengamatan epidemiologi penyakit • Kaderisasi masyarakat di bidang kesehatan • Surat keterangan medis • Konsultasi/rujukan • Tatalaksana tugas jaga dan pelayanan medis di luar jam kerja • Pemeriksaan medis pada orang di atas alat angkut
52	Dokter Gigi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 141/KEP/M.PAN/11/2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik dibidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku • Kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit/wabah tertentu, dan upaya promotive preventif pada masyarakat • Keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktik kedokteran gigi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuratif dan rehabilitatif • Promotif dan preventif
53	Dokter Gigi Spesialis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 141/KEP/M.PAN/11/2003)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik dibidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku • Kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, penanggulangan penyakit/wabah tertentu, dan upaya promotive preventif pada masyarakat • Keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktik kedokteran gigi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuratif dan rehabilitatif • Promotif dan preventif

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
54	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2018)	<p>Advokasi Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 16 tahun 1992 dan PP No. 82 tahun 2000 • UU No. 5 tahun 1990 • UU No. 5 tahun 1994 • UU No. 18 tahun 2012 dan PP No. 28 tahun 2004 • UU No. 41 tahun 2014 • UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 31 tahun 2019 • Organisasi dan ketentuan internasional <p>HPHK dan Keamanan Hayati Hewani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis risiko HPHK dan keamanan hayati hewani • HPHK dan Pemantauan Daerah sebar HPHK • Pengawasan Keamanan Hayati Hewani • Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewan • Tindakan Karantina Hewan
55	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/17/M.PAN/9/2008)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kedokteran • Pelayanan spesialisik • Pelayanan pendidikan • Pengabdian masyarakat <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan medik spesialisik • Pelayanan kedokteran forensik • Pelayanan kesehatan lainnya • Pelayanan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 1 • Pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi • Pendidikan dokter • Pengembangan program kuliah dan bahan pengajaran • Pengembangan program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum • Penguji pada ujian akhir • Penilaian bahan ajar atau kurikulum
56	Dosen (PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013)	<p>Subtes Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode etik dalam kegiatan pengajaran • Kode etik dalam kegiatan penelitian • Kode etik dalam kegiatan pengabdian masyarakat • Aturan akademik • Prinsip-prinsip pembelajaran • Penggunaan IT dalam pembelajaran • Penilaian hasil belajar • Metodologi penelitian • Pengetahuan umum penelitian • Publikasi penelitian • Diseminasi hasil penelitian • Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat • Kemitraan masyarakat • Pengembangan kewirausahaan • Pengembangan desa mitra <p>Subtes Bahasa Inggris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak terhadap pembaca yang diinginkan penulis berdasarkan analisis fakta-fakta yang disebutkan dalam berita. • Sikap/pandangan penulis dalam teks berita tersebut. • Fakta beserta sumber informasi yang digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Parafrase (kalimat efektif) yang maknanya sesuai dengan kalimat dalam teks berita tersebut. <p>Subtes Penalaran dan Pemecahan Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Critical Thinking • Creative Thinking • Analytical Thinking • Strategic Thinking <p>Subtes Dimensi Psikologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Keunggulan Personal • Keunggulan sebagai Pembelajar • Penggerak Perubahan • Kompetensi Sosial
57	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 18/KEP/M.PAN/11/2000)	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>Perencanaan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Investigasi/penyelidikan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Pembedahan tikus dalam rangka surveilans • Perumusan program di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Survei/pengamatan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit • Uji kerentanan/resistensi dan efikasi di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit
58	Entomolog Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. 18/KEP/M.PAN/11/2000)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus:</p> <p>Kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor • Pengamatan vektor dan serangga pengganggu • Penyelidikan vektor dan serangga pengganggu • Pemberantasan/pengendalian vektor dan serangga pengganggu • Pencarian dan penemuan/surveilans penderita • Pengobatan penderita • Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan dan pemberantasan/ pengendalian vektor serta serangga pengganggu • Perencanaan materi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vector • Pemberdayaan masyarakat, menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat serta evaluasi dan pemantauan dalam kegiatan entomologi kesehatan/pemberantasan vektor

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
59	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 17/KEP/M.PAN/11/2000)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif • Komunikasi intrapersonal dan interpersonal • Dasar-dasar advokasi • Pengorganisasian kegiatan epidemiologi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman epidemiologi manajerial terbatas • Penyusunan epidemiologi manajerial • Pelaksanaan surveilans epidemiologi • Pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat • Melaksanakan kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan • Menganalisa, mengarahkan dan mendukung surveilans epidemiologi lingkup terbatas • Penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa dengan metode epidemiologi analitik • Definisi dini penyakit dan faktor risiko kejadian luar biasa dengan skrining faktor risiko • Pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat pada kejadian luar biasa • Penanggulangan wabahberisiko rendah • Pengumpulan dan pengolahan data kualitatif • Merancang, mengumpulkan, mengolah dan validasi data referensi • Kuantitas dan kualitas data wawancara • Validasi kualitas dan kuantitas data • Laporan dan umpan balik kabupaten • Kajian epidemiologi analitik • Penyebarluasan informasi epidemiologi
60	Epidemiolog Kesehatan Terampil (PERMENPANRB No. 17/KEP/M.PAN/11/2000)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, kebijakan dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal. • Perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan narkoba, imunisasi, program CERDIK, program Keluarga Berencana dan program keselamatan pasien. <p>Kemampuan Khusus: Kegiatan epidemiologi kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi • Pengamatan epidemiologi • Penyelidikan epidemiologi • Pencegahan dan pemberantasan penyakit • Pemberdayaan masyarakat
61	Fisikawan Medis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. PER/12/M.PAN/5/2008)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan teknis • Pelayanan keselamatan radiasi • Penyiapan alat pelayanan fisika medik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kedokteran nuklir • Pelayanan radioterapi • Pelayanan radiodiagnostik/pencitraan medis

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
62	Fisioterapis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. KEP/04/M.PAN/1/2004)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika dan komunikasi • Pengelolaan pelayanan fisioterapi • Penyuluhan fisioterapi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assesment/tes dan pengukuran fisioterapi • Evaluasi fisioterapi • Intervensi kasus fisioterapi • Intervensi metode fisioterapi • Perencanaan pelayanan fisioterapi • Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi pada individu/kelompok • Tindakan terapi pada gangguan gerak dan fungsi (kuratif) • Pemulihan/penyesuaian gerak dan fungsi (rehabilitasi dan kompensatori) • Pelayanan tugas tes khusus fisioterapi • Pengembangan sarana/prasarana • Memimpin satuan unit kerja pelayanan fisioterapi
63	Fisioterapis Terampil (PERMENPANRB No. KEP/04/M.PAN/1/2004)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi, informasi dan edukasi • Kondisi umum dan tanda vital • Bantuan hidup dasar <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeringkatan tingkat dasar • Intervensi tingkat sederhana • Kelainan/masalah gerak dan fungsi • Dokumentasi tindakan fisioterapi
64	Guru Ahli Pertama (PERMENPANRB No 16 Tahun 2009)	<p>Kompetensi Guru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pedagogik: kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya • Kompetensi professional: penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya
65	Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2018)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<p>Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar udaraan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang Inspektur Angkutan Udara • Standar pelayanan penerbangan • Perizinan angkutan udara • Petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan angkutan udara
66	Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 57 Tahun 2018)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait Penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara, dan Kebandar udaraan) • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Bangunan hijau dan energi terbarukan • Fasilitas sisi darat dan sisi udara di bandar udara • Keselamatan dan keamanan penerbangan bidang bandar udara • Sistem manajemen keselamatan bidang bandar udara
67	Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 55 Tahun 2018)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil Internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil Internasional (ICAO Doc & Annexess) <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Nasional (UU, PP, PM terkait Penerbangan) • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (Bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara, dan Kebandar udaraan)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Barang-barang berbahaya, KKOP di Bandar Udara dan pemadaman kebakaran penerbangan • Prosedur pelaksanaan audit dan investigasi di bidang keamanan penerbangan
68	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 37 Tahun 2017)	<p>Kompetensi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan terkait regulasi ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait keselamatan ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan • Pengetahuan terkait isu terkini ketenagalistrikan <p>Kompetensi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik • Inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik • Inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik • Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik • Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik • Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
69	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2002)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi • Isu-isu strategis di bidang minyak dan gas bumi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reservoir dan Produksi Migas • Pengolahan Migas • Lingkungan • Manajemen
70	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 9 Tahun 2018)	<p>Kemampuan Umum</p> <p>Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan</p> <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan penerapan prinsip-prinsip <i>Hazard Analytical Critical Control Point</i> (HACCP) • Ketertelusuran hasil perikanan • Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan • Cara penanganan ikan yang baik (CPIB)
71	Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2020)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait Kementerian Perhubungan) • Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan • Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO, FAA, EASA, EUROCONTROL, dll) • Hukum penerbangan sipil internasional • Jenis peraturan penerbangan sipil internasional (ICAO Doc & Annexes) <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi nasional (UU, PP, PM terkait penerbangan)

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem operasi penerbangan sipil nasional • Peraturan teknis pengoperasian penerbangan sipil nasional (bidang Angkutan Udara, Keamanan Penerbangan, Navigasi Penerbangan, Kelaikudaraan, Operasi Pesawat Udara dan Kebandar Udaraan) • <i>Stakeholder</i> penyelenggara penerbangan sipil nasional (Airlines, Airport, Airnav, Authority) • Tugas, tanggung jawab dan kompetensi personil penerbangan • Peraturan Menteri yang mengatur pelayanan navigasi penerbangan • Kriteria, tugas dan wewenang inspektur navigasi penerbangan • Standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengendalian pelayanan navigasi penerbangan • Petunjuk teknis pengawasan pelayanan navigasi penerbangan
72	Inspektur Tambang Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017)	<p>Kemampuan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Kegiatan Usaha Pertambangan • Isu-isu strategis di sektor pertambangan mineral dan batubara <p>Kemampuan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksplorasi, Sumber Daya dan Cadangan • Lingkungan dan Keselamatan Pertambangan • Kebijakan Pertambangan • Teknik Penambangan • Pengolahan Mineral dan Batubara
73	Instruktur Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 82 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja • Pemahaman kompetensi kerja • Pembuatan perangkat pelatihan kerja • Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja • Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja • Penyusunan rencana pelatihan kerja • Permenpan RB Nomor 82 tahun 2020
74	Instruktur Terampil (PERMENPANRB Nomor 82 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan pelatihan kerja • Pengembangan dan pelatihan SDM instruktur • Pengembangan program dan sistem pelatihan kerja • Penyusunan rencana pelatihan kerja • Permenaker No 21 Tahun 2014, No 9 Tahun 2018, No 2 Tahun 2018, No 16 Tahun 2019 • Permenakertrans No 8 Tahun 2014, No 5 Tahun 2012 • PermenPANRB No 82 Tahun 2020 • Kepmenaker No 161 Tahun 2015, Kepmenaker No 3 Tahun 2021
75	Jaksa Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 18/M.PAN/1989)	<p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Hukum Nasional dan Internasional • Asas Hukum <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukum Pidana Formil • Hukum Pidana Materiil • Hukum Pidana Khusus • Kriminologi • Regulasi UU Intelijen

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata Materiil • Hukum Perdata Formil • Hukum TUN
76	Kataloger Pemula (PERMENPANRB No. PER/07/KEP/M.PAN/5/2007)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem nomor sediaan nasional • Pertahanan negara • Pelaksanaan pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI (Permenhan Nomor 17 Tahun 2014) • Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat utama sistem senjata TNI di lingkungan Kemhan dan TNI • Jabatan fungsional kataloger • Pembinaan materiil pertahanan negara • Manajemen logistik • Materiil • Program pengembangan teknologi industri pertahanan • Pokok pokok penyelenggaraan kodifikasi materiil sistem NSN di lingkungan TNI
77	Konselor Adiksi Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 44 Tahun 2018)	<p>Kompetensi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba • Pengetahuan dasar ketergantungan narkoba • Kegiatan komunikasi efektif • Kegiatan pencatatan dan pelaporan <p>Kompetensi khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skrining GPZ pada klien • Penerimaan awal klien dengan GPZ • Asesmen klien dengan GPZ • Perencanaan rawatan pada klien dengan GPZ • Rancangan edukasi pada klien dengan GPZ • Edukasi pada klien dengan GPZ • Konseling individu pada klien dengan GPZ • Konseling kelompok pada klien dengan GPZ • Intervensi keluarga pada klien dengan GPZ • Penanganan dini saat kritis pada klien dengan GPZ • Konferensi kasus pada klien dengan GPZ • Konsultasi dan koordinasi dengan profesi dan atau lembaga lain • Supervisi layanan pada klien dengan GPZ
78	Manggala Informatika Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 6 Tahun 2020)	<p>Kemampuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar TIK • Sistem komputer • Jaringan komputer • Sistem informasi • Kriptografi <p>Kemampuan khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya Kaminfo • Manajemen risiko • Standar dan regulasi Kaminfo
79	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 83 Tahun 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Topik-topik dan permasalahan hubungan industrial sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) • Perselisihan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan perundangan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2004) • Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional mediator hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL (DASAR PERMENPANRB)	MATERI POKOK
		(Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020)
80	Medik Veteriner Ahli Pertama (PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Biologi dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu komunikasi dalam tugas dan pekerjaan • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM kesehatan hewan • Keterkaitan peraturan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu Peternakan • Ilmu laboratorium produk hewan dalam tugas dan pekerjaan • Ilmu tentang agen penyebab penyakit hewan • Ilmu Analisis Risiko untuk pemasukan dan pengeluaran hewan agar tidak terjadi masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan produk • Ilmu biologi agak lebih mendalam atau khusus • Istilah yang sering digunakan bidang peternakan dan kesehatan hewan • Jenis desinfektan dan cara penggunaannya • Ilmu Fisiologi Hewan terutama terkait organ tubuh yang terserang penyakit hewan • Ilmu kekebalan yang sangat penting dalam proses pencegahan penyakit • Prinsip Ilmu Kesrawan • Ilmu pelayanan kesehatan hewan terutama di klinik • Ilmu Laboratorium Diagnostik • Lembaga, Lembaga Profesi dan SDM • Ilmu obat hewan, dan penggunaannya dalam pengobatan • Ilmu Pakan • Sistem pelaporan • Tata cara pemotongan hewan • Ilmu pengamatan penyakit hewan • Terkait ilmu jenis-jenis penyakit hewan di Indonesia • Peraturan Peternakan dan Kesehatan Hewan • Ilmu Peternakan • Ilmu Produk Hewan • Ilmu Profesi Kedokteran Hewan • Ilmu Reproduksi/TE
81	Nutrisionis Ahli Pertama (PERMENPANRB No. 23/KEP/M.PAN/4/2001)	<p>Kemampuan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami sumber daya dalam penyelenggaraan makanan banyak • Memahami pemberian vitamin A • Memahami pemberian tablet tambah darah • Memahami pemberian makanan tambahan • Kebutuhan dalam pemantauan pertumbuhan • Edukasi dan konseling gizi <p>Kemampuan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan penyediaan makanan khusus • Diet khusus • Kebutuhan gizi dan perencanaan menu • Hygiene penyelenggaraan makanan • Hasil skrining gizi klien • Pengkajian gizi domain antropometri, biokimia, penilaian fisik, riwayat diet • Intervensi gizi sesuai kondisi klien • Kolaborasi dalam asuhan gizi • Monitoring dan evaluasi • Indikator keberhasilan asuhan gizi • Analisis data • Menentukan masalah gizi • Standar mutu dan kecukupan gizi masyarakat